



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. MARTHA PARULINA BERLIANA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KATARINA ENDANG SAWESTRI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAWA BARAT,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURWAKARTA,



Katarina Endang Sawestri, S.H., M.H.

Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	100%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	100%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	100%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	90
		Nilai Kinerja Anggaran	95

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.213.872.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 11.269.047.000,-
Jumlah		Rp. 12.482.919.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAWA BARAT,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURWAKARTA,



Katarina Endang Sawestri, S.H., M.H.

Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WILLIAM JAKSON SIGALINGGING, S.H.,M.H.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. MARTHA PARULINA BERLIANA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURWAKARTA,

Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA,

William Jakson Sigalingging, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	100%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100%
2	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung	Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kejaksaan Tinggi	90

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Operasional dan pemeliharaan kantor	Rp. 2.446.205.000
2.	Gaji dan tunjangan	Rp. 8.532.442.000
3.	Layanan umum	Rp. 80.400.000
4.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 210.000.000
Jumlah		Rp. 11.269.047.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURWAKARTA,

Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA,

William Jakson Sigalingging, S.H., M.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FEBRIANTO ARY KUSTIAWAN, S.H.,M.Si.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. MARTHA PARULINA BERLIANA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURWAKARTA,

Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA,

Febrianto Ary Kustiawan, S.H.,M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	100%
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	100%
3	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Kegiatan / Operasi Intelijen, Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Negeri Purwakarta	Rp. 40.000.000
2.	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Negeri Purwakarta	Rp. 58.008.000
3.	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Negeri Purwakarta	Rp. 20.000.000
4.	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta	Rp. 38.976.000
5.	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Purwakarta	Rp. 52.400.000
Jumlah		Rp. 209.384.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURWAKARTA,

Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA,

Febrianto Ary Kustiawan, S.H., M.Si.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI IRAWAN HAQIQI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. MARTHA PARULINA BERLIANA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 16 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURWAKARTA,

(Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(Andi Irawan Haqiqi, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	100%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	100%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	100%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pra Penuntutan	Rp. 42.400.000
2	Penuntutan	Rp. 270.990.000
3	Upaya Hukum dan Eksekusi	Rp. 9.000.000
4	Restorative Justice	Rp. 10.808.000
Jumlah		Rp. 331.198.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Purwakarta, 16 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURWAKARTA,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H.)

(Andi Irawan Haqiqi, S.H., M.H)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NANA LUKMANA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. MARTHA PARULINA BERLIANA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURWAKARTA,

Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA,

Nana Lukmana, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100%
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelidikan	Rp. 92.082.000
2.	Penyidikan	Rp. 206.000.000
3.	Pra Penuntutan dan Penuntutan	Rp. 141.728.000
4.	Eksekusi Terdakwa Ditahan Di Dalam Rutan	Rp. 11.080.000
Jumlah		Rp. 450.890.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURWAKARTA,



Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA,



Nana Lukmana, S.H., M.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD SUBHAN, S.H.,M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. MARTHA PARULINA BERLIANA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURWAKARTA,

Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA,

Muhammad Subhan, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	100%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	100%
2	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	100%

3	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	100%
---	---	---	------

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pendampingan Hukum	Rp. 24.000.000
2.	Pelayanan Hukum	Rp. 7.200.000
3.	Pertimbangan Hukum dan Bantuan Hukum	Rp. 13.200.000
4.	Halo JPN	Rp. 6.000.000
Jumlah		Rp. 50.400.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

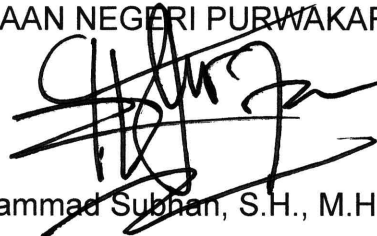
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURWAKARTA,



Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA,



Muhammad Subhan, S.H., M.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DISTA ANGGARA, S.H. CLSP.
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. MARTHA PARULINA BERLIANA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURWAKARTA,

Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA,

Dista Anggara, S.H. CLSP.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN
BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	100%
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemeliharaan	Rp. 100.000.000
2.	Pemusnahan	Rp. 20.000.000
3.	Penyelesaian	Rp. 20.000.000

Jumlah	Rp. 140.000.000
--------	-----------------

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURWAKARTA,



Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA,

Dista Anggara, S.H. CLSP.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FATMAWATI ADISTIA SUARNO, S.H.

Jabatan : Kepala Urusan Kepegawaian, Keuangan dan PNBP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WILLIAM JAKSON SIGALINGGING, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN
PEMBINAAN

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN,
KEUANGAN DAN PNBP

WILLIAM JAKSON S, S.H., M.H.

FATMAWATI ADISTIA S, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN PNBP
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan dukungan manajemen terhadap bidang teknis dengan penerapan system keuangan yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta	Persentase laporan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran dan laporan keuangan lengkap dan terverifikasi	100 %
	Persentase penyerapan anggaran serta laporan keuangan yang	100 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	tepat dan akuntabel	
	Persentase perencanaan pengelolaan anggaran yang tersusun dengan baik sesuai kebutuhan	100 %
	Persentase laporan pertanggung jawaban penerimaan negara tersusun secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	100 %
	Persentase laporan keuangan yang telah direkonsiliasi dengan KPPN dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	100 %

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-	-	-

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,
KEPALA SUB BAGIAN
PEMBINAAN



WILLIAM JAKSON S, S.H.

Pihak Pertama,
KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN,
KEUANGAN DAN PNBP



FATMAWATI ADISTIA S, S.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FUJILESTARI ALI, S.E.

Jabatan : Kepala Urusan Perlengkapan Sub Bagian Pembinaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WILLIAM JAKSON SIGALINGGING, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,
KEPALA SUB
BAGIAN PEMBINAAN

Pihak Pertama,
KEPALA URUSAN
PERLENGKAPAN

WILLIAM JAKSON S, S.H., M.H.

FUJILESTARI ALI, S.E.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan dukungan manajemen terhadap bidang teknis dengan penerapan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri	Persentase sarana dan prasarana di Kejaksaan Negeri Purwakarta yang sesuai kebutuhan	100 %
	Persentase tercapainya Laporan keadaan BMN yang tercatat dengan baik di update secara berkala	100 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Purwakarta	Persentase tercapainya pengadaan barang persediaan yang dikelola dengan baik sesuai kebutuhan	100 %
	Persentase Laporan BMN yang telah direkonsiliasi dengan KPPN dan Kejaksanaan Tinggi Jawa Barat	100 %

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-	-	-

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,
KEPALA SUB
BAGIAN PEMBINAAN

WILLIAM JAKSON S, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
KEPALA URUSAN
PERLENGKAPAN

FUJILESTARI ALI, S.E.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AFIEF DWIBOWO RIZKI.

Jabatan : Plt. Kepala Urusan Tata Usaha, Perpustakaan dan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Sub Bagian Pembinaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WILLIAM JAKSON SIGALINGGING, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN
PEMBINAAN

WILLIAM JAKSON S, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

PLT. KEPALA URUSAN
TU, PERPUSTAKAAN dan
DASKRIMTI

AFIEF DWIBOWO RIZKI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA URUSAN TATA USAHA, PERPUSTAKAAN DAN DASKRIMTI
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya dukungan manajemen terhadap bidang teknis dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mendukung kinerja Kejaksaan Republik	Persentase Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun dengan baik sesuai dengan kebutuhan.	100%
	Persentase Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersusun secara lengkap, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta	Persentase Laporan Capaian Kinerja secara berkala yang tersusun secara cepat dan akuntabel sesuai yang dibutuhkan	100%

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-	-	-

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,
 KEPALA SUB BAGIAN
 PEMBINAAN

Pihak Pertama,
 PLT. KEPALA URUSAN
 TU, PERPUSTAKAAN dan
 DASKRIMTI

WILLIAM JAKSON S, S.H., M.H.

AFIEF DWIBOWO RIZKI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALFALAH TRI WAHYUDI, S.H.
Jabatan : Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Masyarakat, Teknologi Informasi Seksi Intelijen

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FEBRIANTO ARY KUSTIAWAN, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI INTELIJEN

Pihak Pertama,
KEPALA SUB SEKSI
IPOHANKAM, TI, PROLIN DAN PENKUM

FEBRIANTO ARY KUSTIAWAN, S.H., M.Si.

ALFALAH TRI WAHYUDI, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB SEKSI IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN KEAMANAN,
SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN, TEKNOLOGI INFORMASI
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis	Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan	100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan	Persentase lembaga atau pihak yang diberikan penyuluhan dan	100%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis	Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan	100%
penerangan hukum	penerangan hukum tercapai dengan baik	
Meningkatnya dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase pelaksanaan penyelidikan/penyidikan/pengamanan (LIDPAMGAL) dan pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) terlaksana dengan baik	100%

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-	-	-

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI INTELIJEN

Pihak Pertama,
KEPALA SUB SEKSI
IPOHANKAM, TI, PROLIN DAN PENKUM


FEBRIANTORY KUSTIAWAN, S.H., M.Si.


ALFALAH TRI WAHYUDI, S.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERU PRIYO PRABOWO, S.H.
Jabatan : Kepala Subseksi II Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FEBRIANTO ARY KUSTIAWAN, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala seksi Intelijen

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 16 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI
INTELIJEN,

(FEBRIANTO ARY K, S.H., M.Si.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI II SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA,

(HERU PRIYO PRABOWO, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI II SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis	Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan	100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan Meningkatkan kegiatan pengamanan pembangunan strategis	Persentase lembaga atau pihak yang diberikan penyuluhan dan Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan	100%
penerangan hukum	penerangan hukum tercapai dengan baik	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase pelaksanaan penyelidikan /penyidikan/ pengamanan (LIDPAMGAL) dan pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) terlaksana dengan baik	100%

No	Rincian Output	Anggaran
(1)	(2)	(3)

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Purwakarta, 16 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI
INTELIJEN,

(FEBRIANTO ARY K, S.H., M.Si.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI II SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA,



(HERU PRIYO PRABOWO, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELSANAZ NADEA, S.H.
Jabatan : Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Seksi Tindak Pidana Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI IRAWAN HAQIQI, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 16 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM,

(ANDI IRAWAN HAQIQI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB SEKSI
PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN
EKSAMINASI,

(ELSANAZ NADEA, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Penyelesaian Kualitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di wilayah hukum Negeri Purwakarta	Persentase penelitian berkas perkara serta pembuatan Rencana dakwaan dengan tepat, cepat, dan akurat pada tahap pra penuntutan yang berhasil diselesaikan	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta	
	Persentase pelaksanaan eksekusi terpidana dan barang bukti perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi	100%

No	Rincian Output	Anggaran
(1)	(2)	(3)
-	-	-

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Purwakarta, 16 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM,

(ANDI IRAWAN HAQIQI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB SEKSI
PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN
EKSAMINASI,

(ELSANAZ NADEA, S.H)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LEO BERNANDO AGLESIUS, S.H.
Jabatan : Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI IRAWAN HAQIQI, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 16 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM,

(ANDI IRAWAN HAQIQI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN
PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(LEO BERNANDO AGLESIUS, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Penyelesaian Kualitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di wilayah hukum Negeri Purwakarta K	Persentase penelitian TARGET berkas perkara serta pembuatan Rencana dakwaan dengan tepat, cepat dan akurat pada tahap pra penuntutan yang berhasil diselesaikan	100%
	Persentase perkara yang 100 diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta	100%
	Persentase pelaksanaan eksekusi	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	terpidana dan barang bukti perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi	

No	Rincian Output	Anggaran
(1)	(2)	(3)

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Purwakarta, 16 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM

(ANDI IRAWAN HAQIQI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN
PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(LEO BERNANDO AGLESIIUS, S.H)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YANUARDI YOGASWARA, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Seksi Tindak Pidana Khusus

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NANA LUKMANA, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI
TINDAK PIDANA KHUSUS

NANA LUKMANA, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KASUBSI PENUNTUTAN, UHEKSI
TINDAK PIDANA KHUSUS

YANUARDI YOGASWARA, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan	Persentase Penelitian Berkas Perkara serta pembuatan Rencana Dakwaan dengan tepat, cepat dan akurat yang berhasil diselesaikan	100%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Negeri Purwakarta secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase pemeriksaan Saksi, Pembuatan Laporan Perkembangan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	100%
	Persentase Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan yang dilaksanakan dengan baik	100%
	Persentase Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan yang dilaksanakan dengan baik	100%
	Persentase pelaksanaan eksekusi terpidana dan barang bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta yang telah dieksekusi	100%
	Persentase pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta	100%
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase Penelitian Berkas Perkara serta pembuatan Rencana Dakwaan perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai dan pajak) dan tppu di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	100%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Persentase penelitian berkas perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta yang diselesaikan pada tahap penuntutan	100%
	Persentase pelaksanaan eksekusi terpidana dan barang bukti perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta yang telah dieksekusi	100%

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-	-	-

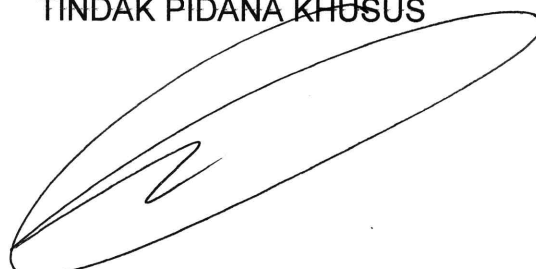
Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,
 KEPALA SEKSI
 TINDAK PIDANA KHUSUS



NANA LUKMANA, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
 KASUBSI PENUNTUTAN, UHEKSI
 TINDAK PIDANA KHUSUS



YANUARDI YOGASWARA, S.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SARAH MARISI IRENEY SIDAURUK, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penyidikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NANA LUKMANA, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 16 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI
TINDAK PIDANA KHUSUS,

(NANA LUKMANA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB SEKSI
PENYIDIKAN

(SARAH MARISI IRENEY SIDAURUK, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase Penelitian Berkas Perkara serta pembuatan Rencana Dakwaan dengan tepat, cepat, dan akurat yang berhasil diselesaikan	100%
	Persentase pemeriksaan Saksi, Pembuatan Laporan Perkembangan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	
	Persentase Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan yang dilaksanakan dengan baik	100%
	Persentase Penelitian Berkas Perkara Tindak pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan yang dilaksanakan dengan baik	100%
	Persentasi pelaksanaan eksekusi terpidana dan barang bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta yang telah dieksekusi	100%
	Persentase pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta	100%
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase Penelitian Berkas Perkara serta pembuatan Rencana Dakwaan perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai dan pajak) dan tppu di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	100%
	Persentase penelitian berkas perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	yang diselesaikan pada tahap penuntutan	
	Persentase pelaksanaan eksekusi terpidana dan barang bukti perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwakarta yang telah dieksekusi	100%

No	Rincian Output	Anggaran
(1)	(2)	(3)
-	-	-

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri


E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Purwakarta, 16 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI
TINDAK PIDANA KHUSUS,



(NANA LUKMANA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB SEKSI
PENYIDIKAN,



(SARAH MARISI IRENEY SIDAURUK, S.H)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RENOFADLI RIZKISYAH, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD SUBHAN, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA



MUHAMMAD SUBHAN, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SUB SEKSI
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA



RENOFADLI RIZKISYAH, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
			berjalan	
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	100%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	100%
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	<p>Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata</p> $\frac{\text{Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata}}{\text{Jumlah kerugian negara}} \times 100$	100%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
	Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Lain		

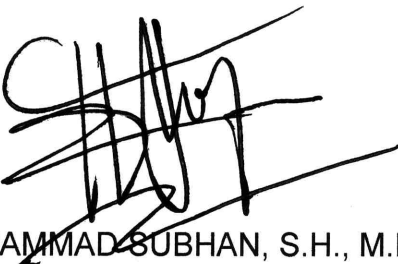
D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-	-	-

Purwakarta, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA

Pihak Pertama,
KEPALA SUB SEKSI
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA



MUHAMMAD SUBHAN, S.H., M.H.



RENOFADLI RIZKISYAH, S.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RURI YUNITA IRIANI, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD SUBHAN, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 16 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA,

(MUHAMMAD SUBHAN, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB SEKSI
PERTIMBANGAN HUKUM,

(RURI YUNITA IRIANI, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	100%
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	100%
Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	100%
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	100%

No	Rincian Output	Anggaran
(1)	(2)	(3)
-	-	-

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Purwakarta, 16 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA,

KEPALA SUB SEKSI
PERTIMBANGAN HUKUM

(MUHAMMAD SUBHAN, S.H., M.H.)

(RURI YUNITA IRIANI, S.H.)